

## **ABSTRAK**

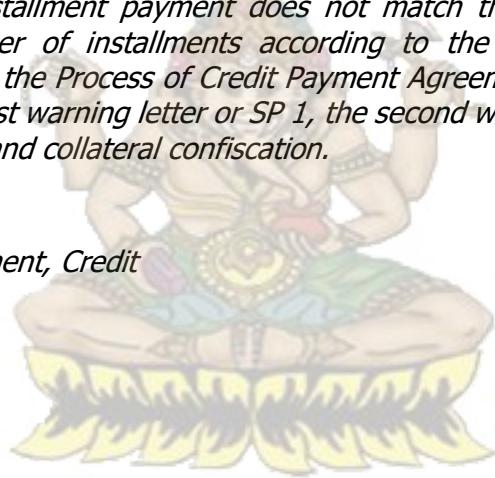
Kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh salah satu koperasi yaitu Koperasi Sari Sedana Artha, dimana pada Koperasi tersebut ditemukan adanya beberapa wanprestasi yang terjadi dalam hal kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan antara koperasi tersebut dengan nasabah koperasi. Adanya wanprestasi dalam proses perjanjian pada Koperasi Sari Sedana Artha. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa masalah penting yang perlu dibahas lebih lanjut tentang Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian Pembayaran Kredit Di Koperasi Sari Sedana Artha dan Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian Pembayaran Kredit Di Koperasi Sari Sedana Artha. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian Pembayaran Kredit Di Koperasi Sari Sedana Artha yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terjadi apabila pihak kedua wanprestasi atau lalai dalam melunasi angsurannya maka pihak pertama berhak menjual objek jaminan atau pengalihan objek jaminan dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan adanya pembatalan perjanjian dimana pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi dan dengan membayar denda sebesar 3% dari jumlah pinjaman, apabila pembayaran angsuran tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan tidak sesuai dengan jumlah angsuran sesuai perjanjian pinjaman. Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian Pembayaran Kredit Di Koperasi Sari Sedana Artha adalah Pemberian surat peringatan pertama atau SP 1, Pemberian surat peringatan kedua atau SP 2, Pemberian surat peringatan ketiga atau SP 3 dan Penyitaan Jaminan.

**Kata Kunci :** Wanprestasi, Perjanjian, Kredit

## **ABSTRACT**

*Savings and loan business activities are carried out by one of the cooperatives, namely the Sari Sedana Artha Cooperative, where in the cooperative it was found that there were several defaults that occurred in terms of savings and loan business activities carried out between the cooperative and cooperative customers. There was a default in the agreement process with the Sari Sedana Artha Cooperative. Based on the background of the problems mentioned above, there are several important issues that need to be discussed further about: What are the Legal Consequences of Default in the Credit Payment Agreement Process at the Sari Sedana Artha Cooperative and Legal Remedies for Default in the Credit Payment Agreement Process at the Sari Sedana Cooperative Artha. The research method in this study uses this type of research is empirical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The results of this study are the Legal Consequences of Default in the Credit Payment Agreement Process at the Sari Sedana Artha Cooperative referring to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. If the second party defaults or is negligent in paying off the installments, the first party has the right to sell the collateral object or transfer object of collateral with the consent of both parties and the cancellation of the agreement where the cancellation of the agreement is accompanied by demands for compensation, fulfillment of the agreement and fulfillment of the agreement accompanied by demands for compensation and by paying a fine of 3% of the loan amount, if the installment payment does not match the due date and not in accordance with the number of installments according to the loan agreement. Legal Remedies Against Default in the Process of Credit Payment Agreements at the Sari Sedana Artha Cooperative are the first warning letter or SP 1, the second warning letter or SP 2, the third warning letter or SP 3 and collateral confiscation.*

**Keywords:** Default, Agreement, Credit



UNMAS DENPASAR